Kinerja BPOM
dalam Angka
Triwulan I
2023

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2023

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 20223 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi pre-market, hingga pengawasan post-market yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 41.237 NIE, pemeriksaan terhadap 5.977 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 12.397 sampel, 71 perkara, dan 129 kegiatan pelaksanaan KIE.

Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2023. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra

Jakarta, 5 Juli 2023
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
HIGHLIGHT 1

I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan 9
II. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan 15
III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman 19
IV. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman 23
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan 25
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat 27
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik 36
VIII. Penguatan Peraturan Perundang-undanngan Pengawasan Obat dan Makanan 42
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 46
X. Kerjasama Internasional 49
XI. Sumber Daya Manusia 52
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I 2023 54
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM 56

LAMPIRAN 56
PENUTUP 58

Daftar Gambar

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan 9

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan 9
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan 10
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 10
Gambar 5. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan 12
Gambar 6. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan 13

Gambar 7. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan 15
Gambar 8. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan I 15
Gambar 9. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan I 2023 16
Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d Triwulan I 2023 17

Gambar 11. Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan I 2023 27
Gambar 12. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I 2023 28
Gambar 13. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform Selama Triwulan I 2023 29
Gambar 14. *Top engagement content* terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan I 2023 29
Gambar 15. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan pada Triwulan I 2023 30
Gambar 16. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Pada Triwulan I 2023 31
Gambar 17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 32
Gambar 18. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi 33
Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media 33
Gambar 20. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi 34
Gambar 21. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM 34
Gambar 22. Metode Implementasi 2D Barcode 36
Gambar 23. Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 31 Maret 2023 37
Gambar 24. Tahapan Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu pada Triwulan I 2023 37
Gambar 25. Contoh Sertifikat Versi Badan POM dan OSS 39
Gambar 26. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan I 2023 44
Gambar 27. Realisasi Anggaran s.d Triwulan I 2023 54

Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)..... 11

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)..... 11

Tabel 3. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan..... 12

Tabel 4. Profil Laporan Efek Samping..... 13

Tabel 5. Inovasi Praktik Baik RB Badan POM yang Dilaporkan Kepada Kementerian PANRB..... 47

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2023

Highlight

Badan POM s.d Triwulan I

Open House Rangkaian HUT 22 BPOM Tangguh Untuk Indonesia: Ajak Generasi Muda Melek Pengawasan Obat dan Makanan

Jakarta – Mengawali rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22, BPOM menyelenggarakan Open House Expo Sistem Pengawasan Life Cycle Produk Obat Dan Makanan di Kantor Pusat BPOM, Jakarta (12/01/2023). Kegiatan yang berlangsung dua hari ini melibatkan siswa-siswi dari sekolah tingkat menengah atas di Jakarta, mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta, serta *stakeholders* BPOM.

Pada hari pertama, kegiatan diikuti oleh sekitar 260 peserta.Peserta pelajar sebanyak 155 orang yang berasal dari SMAN 68, MAN 4, SMA Al-Izhar, dan Jakarta Islamic School. Selain itu, kegiatan ini diikuti juga oleh pelaku usaha dan media sebagai *stakeholders* BPOM. Memasuki hari kedua, Open House diikuti 299 peserta dan melibatkan sejumlah *influencer* serta dihadiri Anggota Komisi IX DPR.

22 Tahun BPOM Unjuk Kinerja Persembahan Untukmu Indonesia

Jakarta - Sudah 22 tahun BPOM mengabdi dan melaksanakan tugas menjaga obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, berkhasiat, dan bermutu. Beragam tantangan dilalui melintasi dinamika zaman yang menuntut perubahan. Inovasi terus dihadirkan hingga di usianya yang ke-22 tahun membuat BPOM berhasil menorehkan berbagai capaian dan prestasi. Terutama tiga tahun terakhir saat-saat sulit melalui pandemi COVID-19.

Dalam peringatan Unjuk Kinerja dan Apresiasi BPOM Pada Masa Tiga Tahun Pandemi COVID-19, BPOM menampilkan gelaran Persembahan Simfoni Untukmu Indonesia, Rabu (15/02/2023). Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito tampil memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lintas sektor baik dari sektor lembaga, pelaku usaha, maupun perorangan yang berkontribusi dalam membangun kemandirian bangsa di bidang obat dan makanan, termasuk penanganan COVID-19.

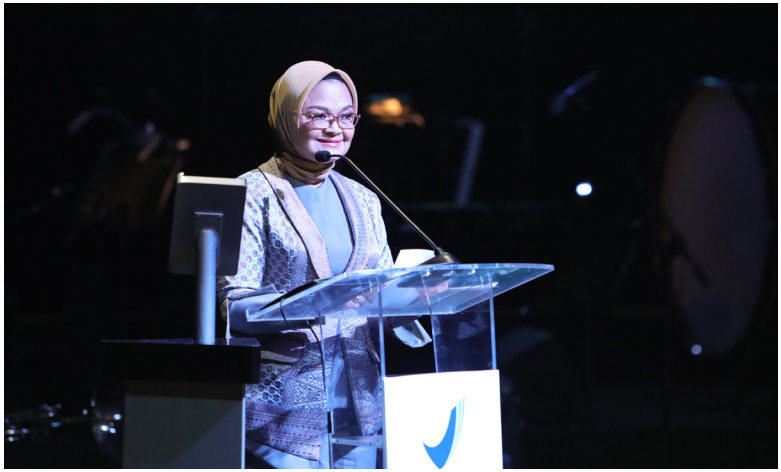

Kolaborasi Multihelix Wujudkan Café Acaraki GAMA dan Jamu Goes to Campus

Yogyakarta – BPOM meresmikan kafe jamu pertama di lingkungan perguruan tinggi, yaitu Café Jamu Acaraki GAMA yang berlokasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (07/03/2023). Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan talkshow *"Jamu Goes to Campus"* sebagai bagian dari rangkaian program BPOM Goes To Campus. BPOM meluncurkan program BPOM Goes to Campus ini bertujuan untuk membangun kerja sama multihelix dengan akademisi dalam rangka mengembangkan Obat Bahan Alam dalam mendukung kemandirian nasional. Peresmian Café Jamu Acaraki dilakukan secara simbolis dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito bersama dengan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, dan Direktur PT Acaraki Nusantara Persada, Jony Yuwono. Kepala BPOM menyampaikan apresiasinya kepada pihak perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Farmasi UGM, atas kolaborasi terhadap inovasi yang telah dilaksanakan karena dapat mendukung pelestarian Jamu sebagai warisan budaya. Sekaligus untuk semakin memperkenalkan Jamu kepada kaum milenial dan generasi muda.

BPOM Kembali Tindak Pelanggaran Pabrik Kosmetika Ilegal

Jakarta — BPOM sebagai otoritas regulatori obat dan makanan secara proaktif melakukan pengawasan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan, termasuk kosmetika. Langkah proaktif BPOM salah satunya dengan menindak pabrik kosmetika yang melakukan proses produksi secara ilegal. Seperti yang dilakukan pada Kamis (09/03/2023), BPOM kembali melakukan penindakan pabrik Kosmetik ilegal di wilayah Jakarta Utara yang diduga memproduksi kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetika. Hasil temuan dari penindakan tersebut adalah barang bukti yang bernilai total Rp7,7 miliar. Barang bukti yang diamankan, antara lain bahan baku berupa bahan kimia obat seperti Hidroquinon, Asam Retinoat, Deksametason, Mometason Furoat, Asam Salisilat, Fluocinolone, Metronidazol, Ketokonazol, Betametason, dan Asam Traneksamat senilai Rp4,3 miliar; bahan kemas berupa pot dan botol kosong untuk produk kosmetika senilai Rp164 juta; produk antara berupa lotion senilai Rp1,2 miliar; produk jadi berupa lotion malam dan berbagai macam krim tanpa merek senilai Rp1,4 miliar.

Gelar Workshop Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, BPOM Fokus pada Percepatan Pengadaan Produk Dalam Negeri untuk Dukung Kinerja

Jakarta – "Bangkit Produk Dalam Negeri, Menuju Kemandirian Bangsa" adalah tema yang diusung pada kegiatan Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Biro Umum BPOM, Selasa (14/03/2023). Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini diselenggarakan dengan tujuan memastikan penerapan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini diikuti secara hybrid oleh 184 peserta yang berasal dari seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM, terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ). Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala BPOM serta menghadirkan narasumber dari lintas sektor terkait, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Akademisi Universitas Indonesia.

Talkshow Farmakovigilans : Membangun Sistem Farmakovigilans yang Efektif untuk Mengawal Penggunaan Obat Dalam Rangka Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Jakarta – “Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) merupakan indikator penting yang menunjukkan bagaimana pemantauan keamanan obat di suatu negara berjalan dengan baik. Untuk itu, BPOM memerlukan dukungan peran aktif dari semua lintas sektor yang terlibat, yaitu industri farmasi, tenaga kesehatan, dan pasien atau masyarakat sebagai pengguna obat”. Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito saat memberikan sambutannya pada kegiatan Talkshow Farmakovigilans bertema Membangun Sistem Farmakovigilans yang Efektif untuk Mengawal Penggunaan Obat Dalam Rangka Keselamatan Pasien (Patient Safety), Senin (20/03/2023).

Talkshow yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh para narasumber dan penanggap dari lintas K/L terkait dan juga Tim Ahli Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Selain itu, turut diikuti oleh perwakilan WHO Indonesia, perwakilan asosiasi profesi kesehatan, perwakilan asosiasi industri farmasi, perwakilan akademisi dari perguruan tinggi di Indonesia, serta perwakilan tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2023

BAB I

Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan Pre Market

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, telah diterbitkan 44.206 keputusan dan 41.237 persetujuan izin edar dari 66.696 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

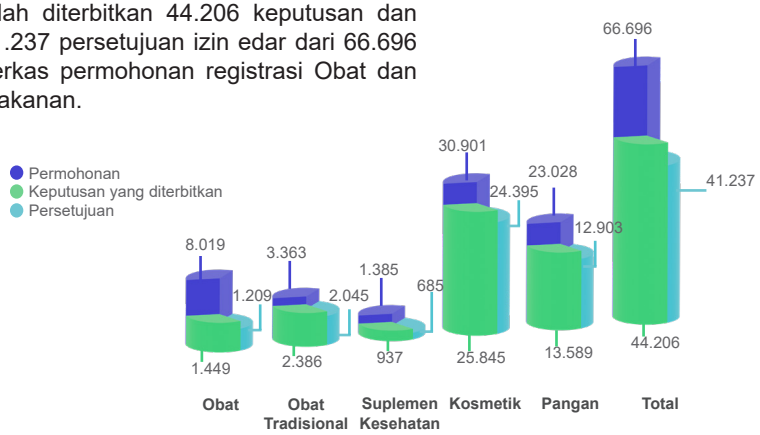

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dari 642 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 475 (73,99%) iklan.

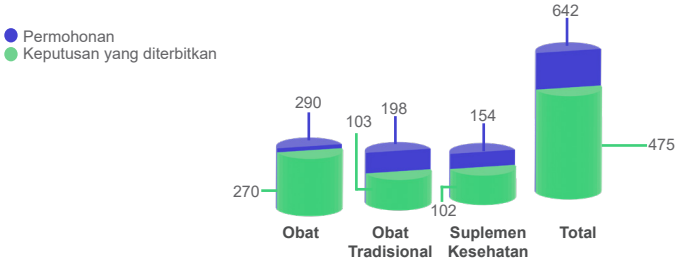

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

Pengawasan Post Market

Pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 telah diperiksa sebanyak 1.255 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 414 (32,99%) sarana adalah TMK.

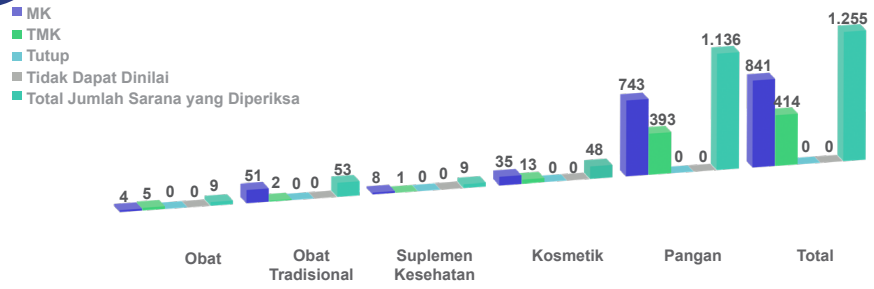

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
MK	4	51	8	35	743	841
TMK	5	2	1	13	393	414
Tutup	0	0	0	0	0	0
Tidak Dapat Dinilai	0	0	0	0	0	0
Total Jumlah Sarana yang Diperiksa	9	53	9	48	1.136	1.255

Keterangan
TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
MK : Memenuhi Ketentuan

Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 telah diperiksa sebanyak 4.722 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 931 (19,72%) sarana adalah TMK.

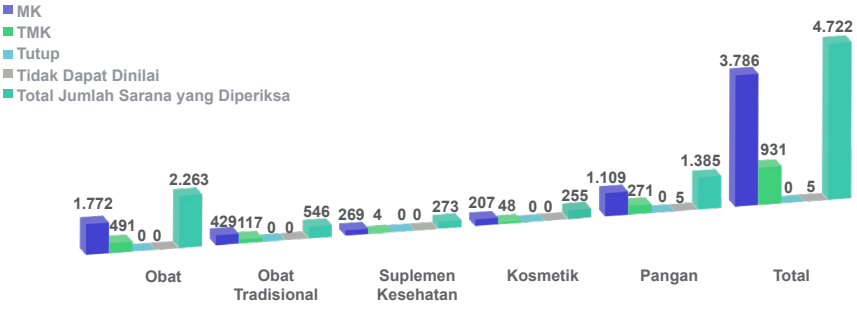

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
MK	1.772	429	269	207	1.109	3.786
TMK	491	117	4	48	271	931
Tutup	0	0	0	0	0	0
Tidak Dapat Dinilai	0	0	0	0	5	5
Total Jumlah Sarana yang Diperiksa	2.263	546	273	255	1.385	4.722

Keterangan
TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
MK : Memenuhi Ketentuan

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah Sampling	TMK		Rusak	TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil Uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa					MS	TMS*			
Obat	Tageted	671	0	0	0	12	671	420	411	9	9	251	420
Obat Tradisional	Tageted	822	6	0	0	26	816	519	470	49	55	297	525
Kuasi	Tageted	27	0	0	0	0	27	15	14	1	1	12	15
Suplemen Kesehatan	Tageted	259	0	0	0	7	259	175	166	9	9	84	175
Kosmetik	Tageted	1549	0	0	0	114	1.549	1.000	887	113	113	549	1.000
Rokok	Tageted	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0
Pangan	Tageted	2561	0	1	0	183	2.560	1.747	1.558	189	190	813	1.748

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dari 5.909 sampel targeted yang disampling terdapat 3.883 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 370 (9,53%) sampel tidak memenuhi syarat.

b. Random

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah Sampling	TMK		Rusak	TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil Uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sam-pel Diperiksa dan Diuji Se-suai Standar
			TIE/Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa					MS	TMS*			
Obat	Random	3170	0	0	0	92	3.170	2,089	2031	58	58	1.081	2.089
Obat Tradisional	Random	2140	2	0	1	94	2.137	1.480	1361	119	122	657	1.483
Kuasi	Random	138	0	0	0	2	138	86	86	0	0	52	86
Suplemen Kesehatan	Random	634	0	0	0	12	634	417	389	28	28	217	417
Kosmetik	Random	3989	3	4	0	201	3.982	2.764	2.612	152	159	1.218	2.771
Pangan	Random	2217	0	0	1	180	2.216	1.667	1.490	177	178	549	1.668

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan I 2023

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dari 12.288 sampel random yang disampling terdapat 8.514 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 534 (6,27%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa izin Edar

Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 telah diterbitkan 27.865 SKI, 4.233 SKE, 1.053 SAS, 50 Uji Klinik, dan 216 AHP Obat dan Makanan.

	Obat	NPP	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
SKI	5.432	-	1.454	600	6.676	13.703	27.865
SKE	204	-	50	104	118	3.757	4.233
SAS	551	-	28	22	41	141	1.053
Uji Klinik	50	-	-	-	-	-	50
AHP	-	216	-	-	-	-	216

Tabel 3. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dari 18.886 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 1.755 (9,29%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

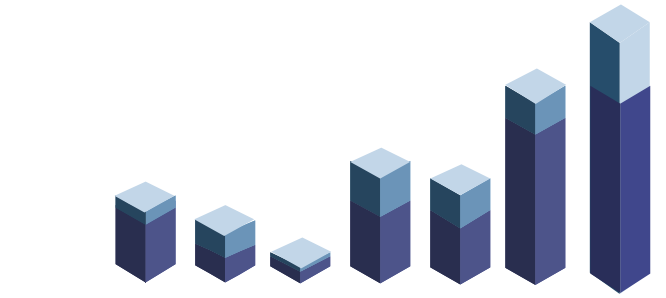

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok	Total
MK	1.238	282	148	1.276	675	13.512	17.131
TMK	122	255	40	498	311	559	1.755

Gambar 5. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

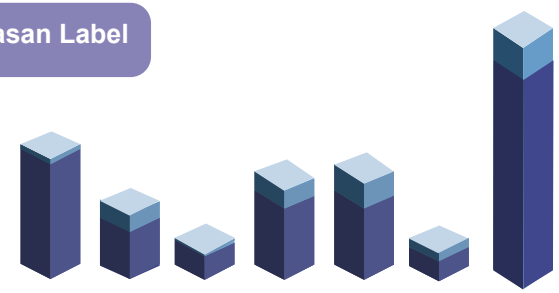

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok	Total
MK	9.434	2.729	817	4.108	4.651	351	22.090
TMK	31	98	9	531	1.125	43	1.819

Gambar 6. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dari 23.909 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 1.819 atau sekitar 7,61% label tidak memenuhi ketentuan.

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 4. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindaklanjut	%
Obat	4.382	3.252	74.21
Obat Tradisional	4	4	100.00
Suplemen Kesehatan	6	6	100.00
Kosmetik	262	238	90.84

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk

Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/ farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

Ka. BPOM
PPNS LINE
PPNS LINE
PPNS LINE

BAB II

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta rawan kasus, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Sampai dengan Triwulan I 2023, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan peta rawan kasus yang aktual sebanyak 894 kasus yang terdiri dari 317 kasus terkait obat, 198 kasus terkait obat tradisional, 2 kasus suplemen kesehatan, 322 kasus terkait kosmetik dan 55 kasus terkait komoditi pangan.

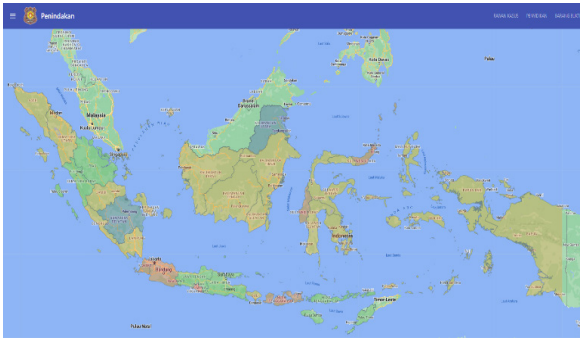

Gambar 7. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

2. Hasil Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun
tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan mayarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik di *premarket* maupun *postmarket*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagi daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPPZA), obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun pro justitia.

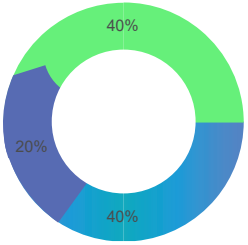

Gambar 8. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan I

Sampai dengan triwulan I, dari pelaksanaan kegiatan intelijen diperoleh 37 laporan informasi yang terdiri dari 13 laporan kasus obat dan NAPPZA, 5 laporan kasus obat tradisional, 10 laporan kasus kosmetik, dan 9 laporan kasus pangan olahan. Sedangan dari pelaksanaan operasi intelijen tersusun 2 laporan intelijen yang terdiri dari kasus kosmetik dan pangan olahan. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 5 rekomendasi intelijen untuk 2 kasus obat dan NAPPZA, 1 kasus kosmetik dan 2 kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan I tahun 2023, ditemukan sebanyak 93.084 link yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

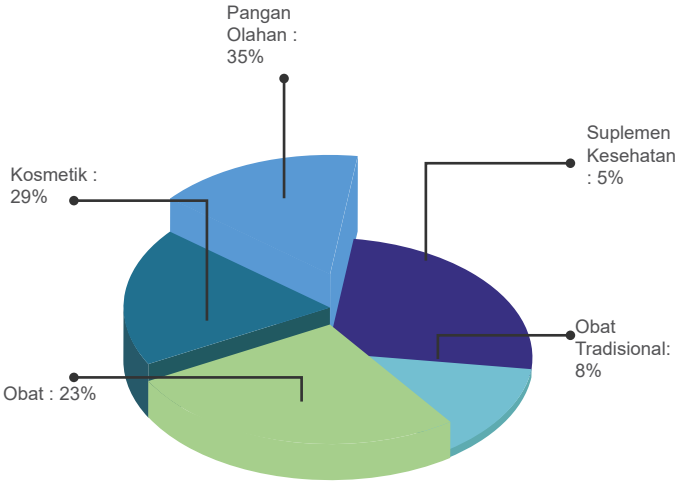

Gambar 9. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan I 2023

4. Hasil Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal). Sampai dengan triwulan I tahun 2023, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 71 perkara. Sebanyak 29 perkara masih dalam tahap SPDP, 13 perkara pada tahap I, 15 perkara pada tahap P18/19, 4 perkara pada tahap P21, 10 perkara pada tahap II dan sampai dengan triwulan I belum ada perkara yang mendapatkan putusan pengadilan.

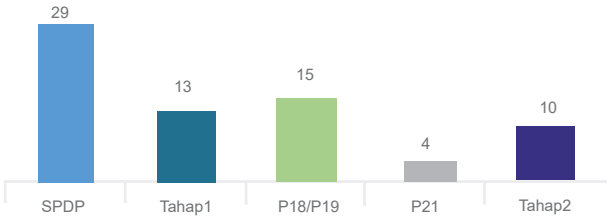

Gambar 10. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d Triwulan I 2023

KONSULTASI PUBLIK
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG KRITERIA DAN TATALAKSANA REGISTRASI OBAT
Jakarta, 10 Februari 2023
PIKKIR

BAB III

Penyusunan Standar/Regulasi/ Pedoman

Obat

Pada tahun 2023 terdapat 17 peraturan/standar/pedoman obat yang diproses penyusunan. Daftar 17 peraturan/ standar/pedoman obat yang telah selesai proses penyusunannya selama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM tentang Obat Pengembangan Baru (12,5%).
2. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Cara Regulatori Obat yang Baik (GRP) (83,33%).
3. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/ Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Hanya Substansi Obat) (12,5%).
4. Penyusunan Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Lampiran XVI) (87,5%).
5. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Metodologi Spesifik Zat Aktif Uji Bioekivalensi (33,33%).
6. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Verifikasi MA Obat Kimia (0%).
7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi (0%).
8. Standar Mutu Untuk Penyusunan Farmakope Indonesia (33,33%).
9. Rancangan Standar Obat Non Kompendial (SONK) (33,33%).
10. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Pedoman Penilaian Mutu dan Kemasan Produk Radiofarmaka (12,5%).
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang tidak memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat,Mutu, dan Label (12,5%)
12. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (12,5%).
13. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 Tentang tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (87,5%).
14. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (25%).

15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (12,5%).
16. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring (12,5%).
17. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (12,5%).

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun pada tahun 2023. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman tersebut sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional (10%).
2. Rancangan Pedoman Empiris Obat Tradisional (10%).
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo (Lampiran) (10%).
4. Pedoman Inovasi Teknologi dan Pendekatan Standardisasinya (10%).
5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan (80%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan mengandung Probiotik (60%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Stabilitas Suplemen Kesehatan (60%).
8. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran Dalam Kosmetik (10%).
9. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penan dan Kosmetika (10%).
10. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (10%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Re komendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik (60%).

Sampai dengan Triwulan I ini telah diselesaikan 27 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun pada tahun 2023. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

1. Pedoman Pengkajian Penetapan Kategori Pangan (20%).
2. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan (50%).
3. Penyusunan Naskah Kebijakan terkait Date Marking (Use-By dan Best-Before Date) Produk Pangan dalam rangka mendukung Produksi Berkelanjutan (20%).
4. Penyusunan Pedoman Meminimalkan Potensi AMR Bawaan Pangan Olahan (Foodborne AMR) (30%).
5. Penyusunan Pedoman/Kode Praktis Mitigasi Risiko terkait Cemaran (MCPDE-GE, BPA) (20%).
6. Penyusunan Pedoman Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan (30%).
7. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (30%).
8. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (26,67%).
9. Penetapan Informasi Nilai Gizi Pada Bagian Depan Label Yang Mudah Dipahami Masyarakat *(FoPNL traffic light)* (20%).
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (20%).
11. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Infomasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (20%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan I telah diselesaikan 25 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.

1500533
HALOBPOM
riset.por
KEPALA BADAN POM RI

BAB IV

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 10 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kesaradaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (30%).
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan (30%).
3. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat (27%).
4. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (30%).
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM (30%).
6. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi (15%).
7. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Kefarmasian (20%).
8. Kajian Polutan Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan (35%).
9. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan (34%).
10. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment Center* (INARAC) (48%).

BAB V

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan
Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan I telah dikembangkan 26 metoded analisis.

2. Baku Pembanding yang dikembangkan
Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan I 2023 telah dikembangkan 4 baku pembanding.

3. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu
Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel lot release vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, terdapat 427 sampel yang telah selesai diuji di laboratorium PPPOMN. Seluruh sampel yang telah selesai uji memenuhi ketentuan timeline sehingga persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 100%.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar
Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar. Pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan kalibrasi terhadap 513 peralatan laboratorium.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/ keahlian.

Pada tahun 2023, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 12 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, Badan POM telah berpartisipasi dalam 10 jejaring laboratorium.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui
KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI
Bersama Tokoh Masyarakat
BAPAK ADE REZKI PRATAMA ANGGOTA KOMISI IX DPR RI
BADAN POM
PDN

BAB VI

Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Pada triwulan I tahun 2023, Badan POM telah menerbitkan 6 siaran pers dan 3 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret sebanyak 4 siaran pers dan 2 penjelasan/klarifikasi.

Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Topik yang paling sering dibahas sepanjang triwulan 1 tahun 2023 yaitu terkait obat; penindakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika ilegal; kegiatan strategis BPOM serta rilis penjelasan BPOM terkait obat dan sirop obat aman (3 penjelasan/klarifikasi). Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial.

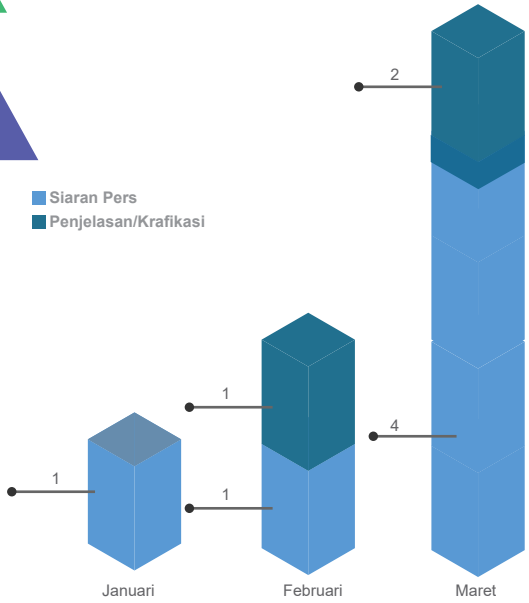

Gambar 11. Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/ Klarifikasi s.d. Triwulan I 2023

Badan POM. Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarkan kepada media massa. Tercatat sebanyak 23 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sepanjang triwulan I tahun 2023.

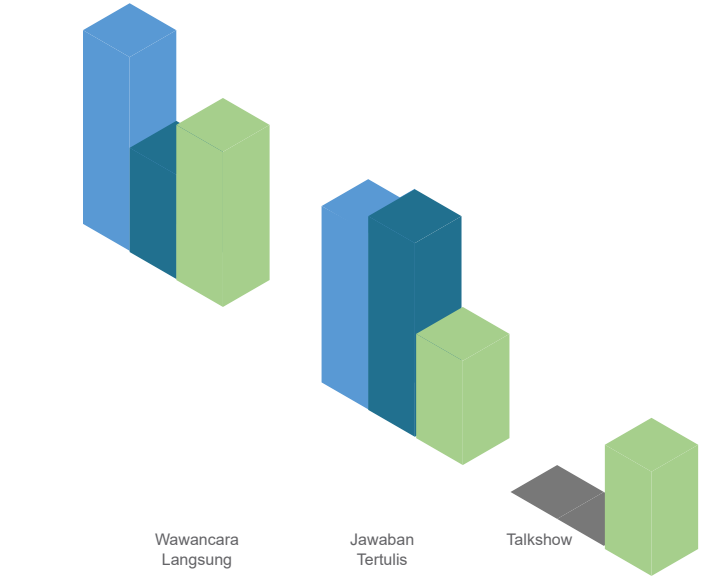

Januari	4	3	0
Februari	1	4	0
Maret	2	1	1

Gambar 12. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan I 2023

Pada triwulan I tahun 2023, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube cukup aktif dengan rata-rata 3-4 unggahan per hari. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 396 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 178 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 135 unggahan, serta Youtube sebanyak 21 unggahan. Sedangkan total unggahan media sosial selama triwulan I 2023 di berbagai platform sebagai berikut:

Sepanjang triwulan I tahun 2023, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/talkshow serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 7 wawancara langsung, 8 jawaban tertulis dan 1 pemenuhan narasumber untuk program talkshow.

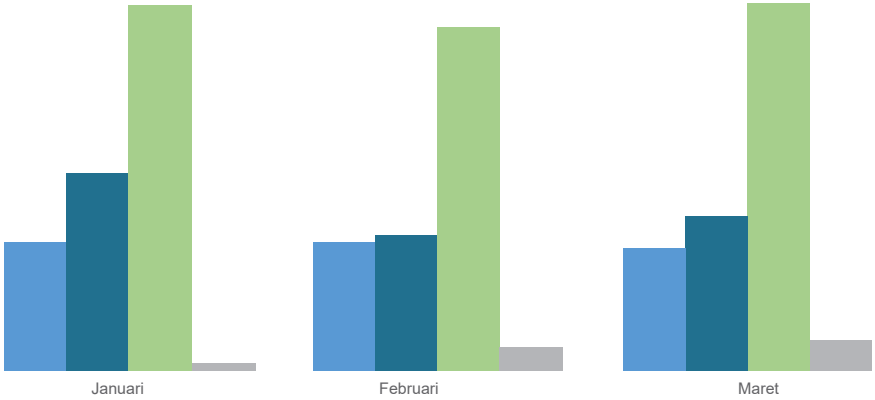

Gambar 13. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform Selama Triwulan I 2023

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan I 2023 di berbagai platform adalah 730 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 255 unggahan di bulan Januari, 229 unggahan di bulan Februari dan 246 unggahan di bulan Maret.

Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut:

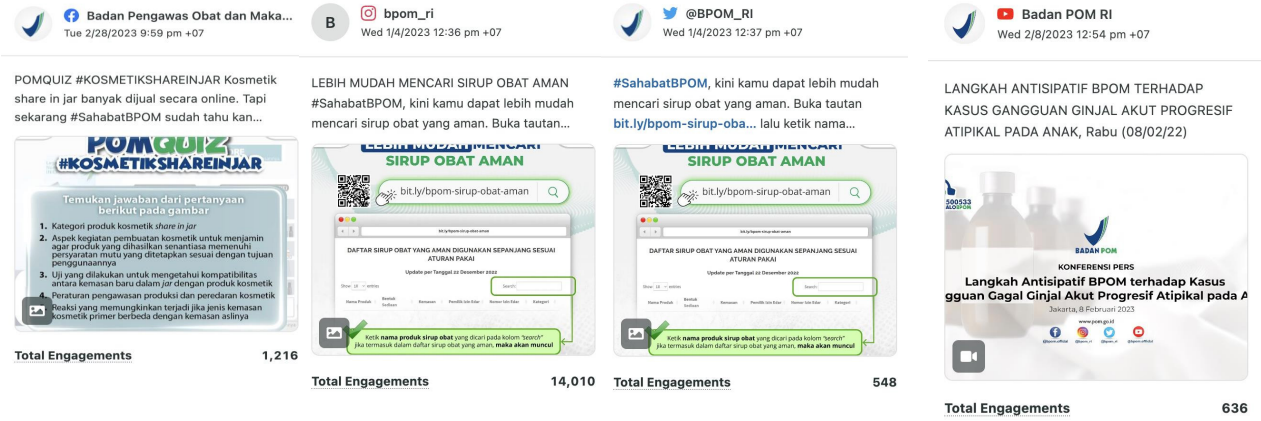

Gambar 14. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan I 2023

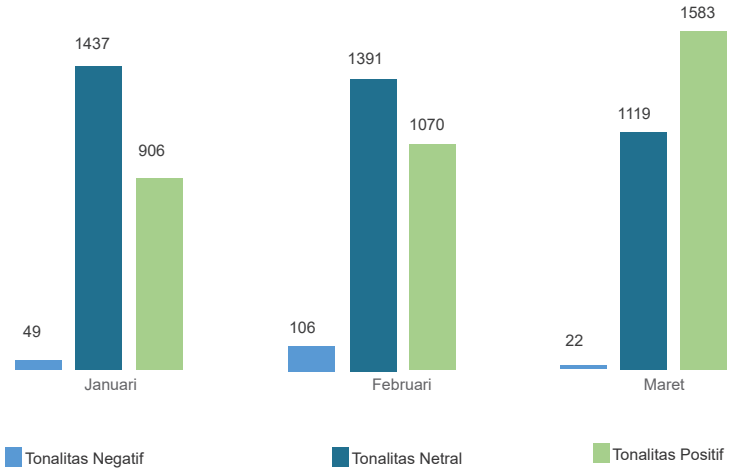

Gambar 15. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan pada Triwulan I 2023

Pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM pada triwulan I tahun 2023 mencapai 7.683 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, berita bertonasi netral sebanyak 3.947 pemberitaan (51,38%) sementara berita bertonasi positif sebanyak 3.559 pemberitaan (46,32%) dan berita bertonasi negatif sebanyak 177 pemberitaan (2,30%). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.

Tingginya pemberitaan positif dan netral pada Maret 2023 karena BPOM melalui Balai Besar/Balai/Loka POM mulai intensif melakukan pengawasan pangan selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri 2023. Pemberitaan netral tertinggi pada bulan Januari 2023 karena pemberitaan vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum, penindakan kasus gagal ginjal akut oleh Polri, vaksinasi Covid-19 anak, pernyataan Kemenkes soal chiki ngebul, pengiriman vaksin Inavac ke Kemenkes dan pernyataan WHO soal sirop obat. Pada Februari 2023, jumlah pemberitaan negatif tertinggi karena pihak eksternal yang memberikan tanggapan negatif terhadap BPOM dalam isu sirop obat.

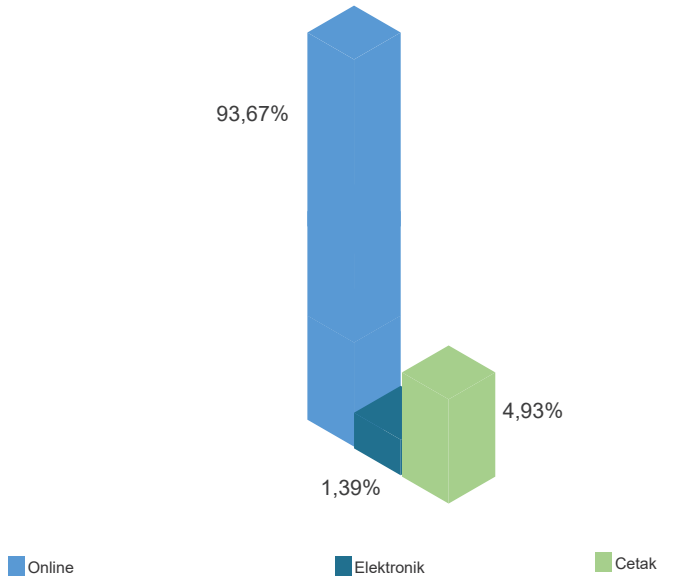

Gambar 16. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Pada Triwulan I 2023

Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Badan POM dan isu Obat dan Makanan hampir seluruhnya berasal dari media online sebesar 93,67% (7.197 berita), sedangkan media cetak 4,93% (379 berita) dan media elektronik 1,39% (107 berita).

Sampai dengan triwulan I 2023 terdapat berbagai topik pemberitaan yang terkait dengan Badan POM. Topik pemberitaan di bulan Januari didominasi oleh Kementerian Kesehatan akan memulai vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum dan Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan mengenai produsen yang diduga melakukan pelanggaran pada produksi sirop obat.

Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers Badan POM mengenai Langkah Antisipatif Badan POM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak pada tanggal 8 Februari 2023 yang menunjukkan hasil pengujian Badan POM pada sejumlah sirop obat Praxion masih aman digunakan. Pada bulan Maret, Badan POM gerebek sebuah pabrik yang diduga memproduksi kosmetik dan produk kecantikan ilegal di kawasan pergudangan Elang Laut Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara.

Gambar 17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023

Pada triwulan I tahun 2023, terdapat 27 permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dari 27 permintaan informasi yang ditindaklanjuti oleh Badan POM, 25 permintaan informasi (92,6%) dikabulkan sepenuhnya, 2 permintaan informasi (7,4%) yang dikabulkan Sebagian dan tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja).

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat selama triwulan I 2023, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/ Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HALOBPOM sebanyak 15.525 layanan, terdiri dari 14.888 (95,89%) layanan permintaan informasi dan 637 (4,11%) layanan pengaduan.

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat selama triwulan I 2023, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/ Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HALOBPOM sebanyak 15.525 layanan, terdiri dari 14.888 (95,89%) layanan permintaan informasi dan 637 (4,11%) layanan pengaduan.

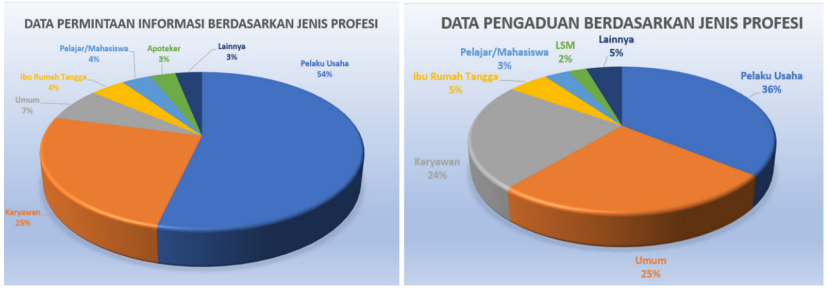

Gambar 18. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 7.998 (53,74%) layanan dan karyawan sebanyak 3.761 (25,25%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 228 (35,79%) layanan dan umum sebanyak 162 (25,43%) layanan.

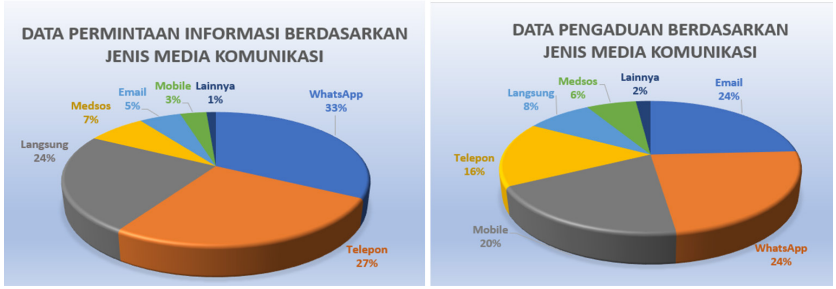

Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 4.857 (32,62%) layanan dan telepon sebanyak 3.948 (26,53%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui email sebanyak 154 (24,17%) layanan dan aplikasi Whatsapp sebanyak 150 (24%) layanan.

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 7.797 (52,37%) layanan dan kosmetik sebanyak 2.600 (17,46%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 290 (45,52%) layanan dan kosmetik sebanyak 193 (30,3%) layanan.

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 7.197 (48,34%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 2.959 (19,87%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang Proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, Isu Obat Sirup yang Berisiko Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), produk terdaftar/legalitas produk, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa.

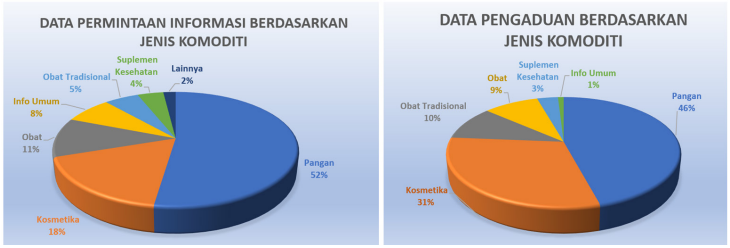

Gambar 20. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

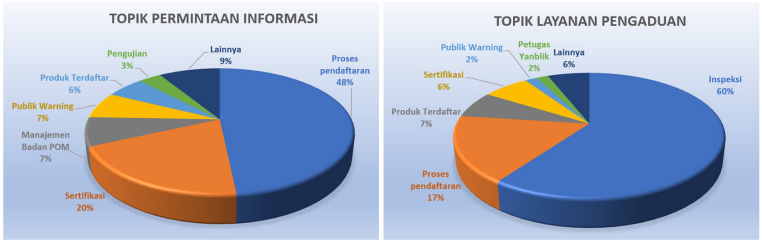

Gambar 21. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Dit-anyakan kepada Badan POM

Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 381 (59,81%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 109 (17,11%) layanan.

BADAN POM

BAB VII

Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

Berdasarkan Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2022 tentang Implementasi 2D Barcode, terdapat 2 jenis metode yaitu identifikasi atau otentikasi/serialisasi dengan rincian sesuai Gambar 23.

Dalam rangka percepatan implementasi 2D Barcode, Badan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat. Selama triwulan I 2023, strategi pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan POM antara lain dengan melakukan desk konsultasi baik secara tatap muka dengan 10 pelaku usaha maupun melalui email dan Whatsapp dengan jumlah laporan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 80 laporan.

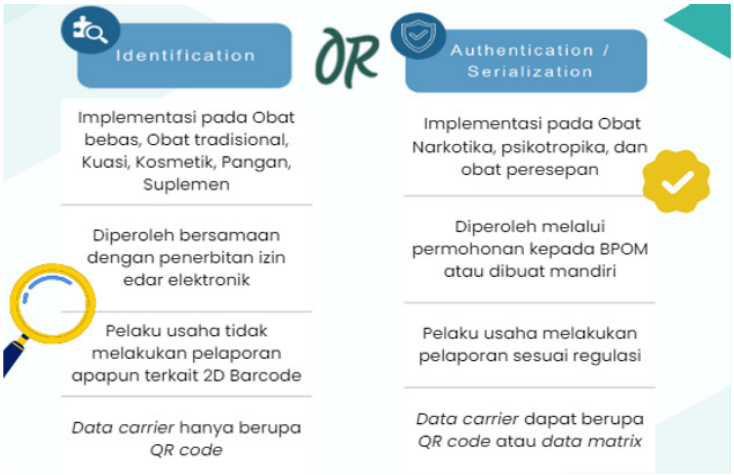

Gambar 22. Metode Implementasi 2D Barcode

2. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat dalam memverifikasi produk, hanya dengan melakukan pemindaian 2D Barcode yang ada pada kemasan, memberikan kemudahan akses berita up to date serta kemudahan akses informasi dan pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan. Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan makanan melalui pembangunan aplikasi BPOM Mobile dimulai sejak 2018. Aktivitas BPOM Mobile dari 2018 – hingga 31 Maret 2023 sebagai berikut:

Gambar 23. Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 31 Maret 2023

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM.

Pada triwulan I 2023 ini telah dilakukan beberapa pengembangan dan pemeliharaan SIPT seperti tercantum pada Gambar 25.

Gambar 24. Tahapan Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu pada Triwulan I 2023

4. Pengembangan Aplikasi CekBPOM/Webreg

Sebagai wujud optimalisasi webreg/CekBPOM (cekbpom.pom.go.id) serta peningkatan aspek security, Badan POM telah melakukan updating aplikasi (redesign aplikasi) dengan tampilan dan penyempurnaan fitur. Hasil redesign terdiri dari revitalisasi fitur manajemen produk dibatalkan, ditarik/recall, dan public warning, penyempurnaan fitur pre-post market integration atau lebih dikenal dengan sharing folder menjadi lebih user friendly dan dilengkapi informasi Obat dan Makanan. Selain itu, hasil redesign bagian menu manajemen user telah diintegrasikan dengan aplikasi Kepegawaian BPOM (SIASN).

5. Aplikasi Kelembagaan (Evortala)

Aplikasi Evortala diimplementasikan dengan 2 (dua) modul terdiri dari penilaian Pelayanan Publik di UPP (Unit Pelayanan Publik) dan Penilaian Klasifikasi UPT (Unit Pelayanan Terpadu). Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) melalui aplikasi ini dinilai sangat inovatif oleh Kementerian PANRB sehingga pada tanggal 25 Januari 2023 Kementerian PANRB menginisiasi pertemuan guna sharing knowledge Aplikasi Evortala terkait Pelaksanaan PEKPPP. Dari pertemuan diperoleh tanggapan di mana Kementerian PANRB berharap aplikasi Evortala ini dapat diadaptasi untuk kepentingan berbagi pakai antar Kementerian/Lembaga. Menanggapi permintaan Kementerian PANRB, Badan POM menyambut baik dan siap berkoordinasi dalam perwujudan komitmen. Pada tahun 2023, guna memastikan Badan POM memiliki keterbukaan informasi publik (KIP) yang baik dalam pelayanan publik maka perlu dilakukan penilaian KIP sesuai tools dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu, aplikasi Evortala dikembangkan dengan penambahan menu monitoring dan evaluasi KIP.

6. Aplikasi Gateway Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dan Pajak

Sistem *Gateway* OSS dan Pajak merupakan penunjang integrasi data antara Badan POM dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemeterian Keuangan. Proyek ini terkait aplikasi integrasi aplikasi Badan POM dengan OSS RBA milik BKPM serta KSWP milik DJP. Dalam integrasi data ini beberapa aplikasi Badan POM yang sudah terintegrasi di antaranya e-Sertifikasi, SPP IRT, SIREKA, e-Reg Pangan, ASROT, SIAP UK, SIAPIK, New Aero, Notifkos, PMR dan lainnya. Hasil akhir data integrasi berupa sertifikat yang dikeluarkan pada sistem OSS dengan menggunakan kop Garuda dengan detail sebagai berikut:

Gambar 25. Contoh Sertifikat Versi Badan POM dan OSS

Dengan terhubungnya aplikasi layanan publik Badan POM dengan OSS RBA melalui integrasi, maka BKPM bersama Badan POM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi integrasi tersebut. Dari hasil monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa isu yang sering terjadi di antaranya:

a. Ditemukannya sebuah data dengan satu (1) NIB yang dimiliki oleh dua (2) pelaku usaha

b. ID Izin sebagai kode unik yang diterbitkan OSS untuk pengajuan PB UMKU di Badan POM tidak terkirim ke gateway OSS BPOM.

c. Sertifikat yang terbit di akun OSS pelaku usaha tidak dapat dicetak dan menampilkan notifikasi "Failed to load PDF document".

d. Sertifikat yang terbit di akun OSS pelaku usaha gagal merge dengan halaman sertifikat dari sistem layanan publik BPOM.

Masukan pengguna layanan OSS dan aplikasi layanan publik di Badan POM pun dijadikan rencana pengembangan lebih lanjut untuk memberikan layanan yang lebih baik.

7. Pengembangan SMART POM

Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dengan cara menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut DAK Nonfisik POM dalam kerangka DAK Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Untuk mempermudah proses monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Nonfisik POM oleh Pemda, maka Badan POM mengembangkan aplikasi SMARTPOM dengan penyesuaian pada menu DAK Nonfisik Tahun 2023. Pada triwulan I, penyesuaian yang dilakukan berupa update form pelaporan sesuai Petunjuk Operasional DAK Nonfisik POM Tahun 2023. Selain itu, telah dilakukan pembahasan integrasi dengan Aplikasi Aladin untuk penyelerasan laporan DAK Nonfisik POM dengan Kementerian Keuangan.

BAB VIII

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, telah ditetapkan 12 Peraturan Badan POM, 14 Keputusan Kepala Badan POM, dan 26 Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 Rancangan Undang-Undang dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

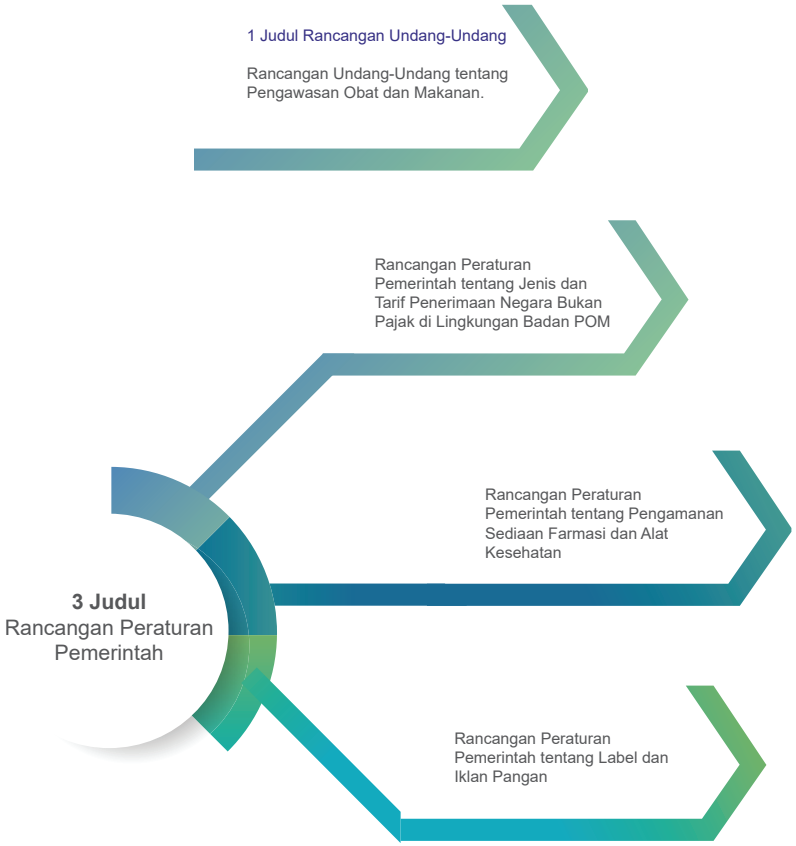

Judul Peraturan Badan POM

- Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin.
- Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat Terhadap Cemaran Nitrosamin.
- Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi.
- Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antibakteri.
- Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Obat Inhalasi dan Nasal.
- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan.
- Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023.

Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM selama triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 27.

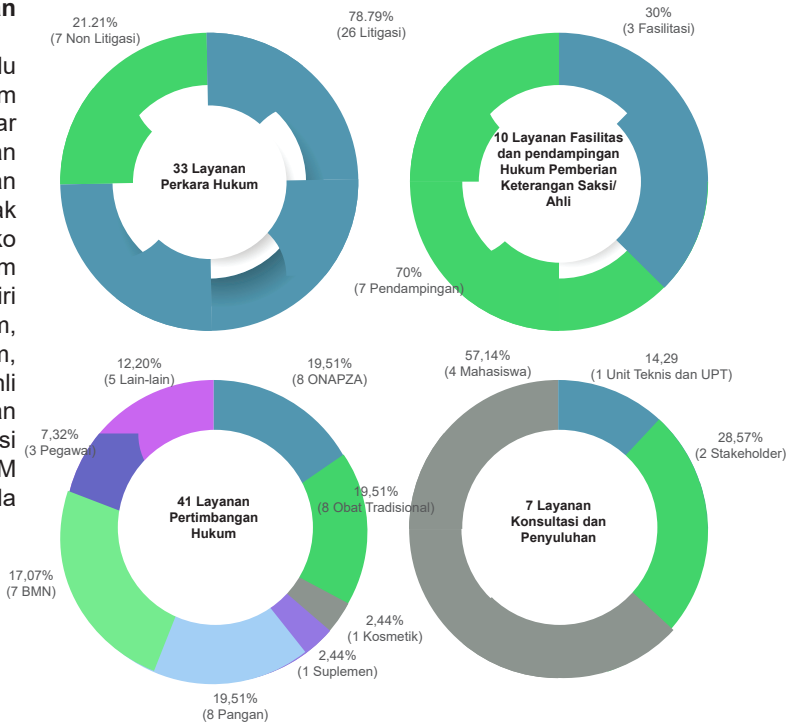

Gambar 26. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan I 2023

BerAKHLAK
BADAN POM
RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN POM

BAB IX

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Biokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

Implementasi penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Badan POM telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan pada tahun 2020. Guna mewujudkan organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah, tahapan selanjutnya ialah penyesuaian sistem kerja yang dilakukan melalui penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyesuaian sistem kerja ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan POM untuk Penyederhanaan Birokrasi dan telah disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM pada 9 Januari 2023.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, setiap instansi pemerintah diminta menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan RB di instansinya berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai media pembelajaran RB antar instansi pemerintah. Badan POM telah menyampaikan 59 informasi praktik baik RB kepada Kementerian PANRB dengan rincian sesuai Tabel 4.

Tabel 5. Inovasi Praktik Baik RB Badan POM yang Dilaporkan Kepada Kementerian PANRB

NO	Kategori Inovasi Praktik Baik RB	Jumlah
1	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	15
2	Inovasi Penanggulangan Kemiskinan	1
3	Inovasi Peningkatan Realisasi Investasi	5
4	Inovasi Penanganan Stunting	4
5	Inovasi Pengendalian Inflasi	-
6	Inovasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2
7	Inovasi Kinerja Lainnya	32

2. Tata Laksana

a. Reviu Proses Bisnis BPOM

Tinjau ulang proses bisnis telah dilaksanakan mulai bulan Januari-Maret 2032 disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja serta Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Tinjau ulang dilaksanakan meliputi 16 peta proses bisnis di lingkungan Badan POM. Pembahasan dilakukan secara daring dengan melibatkan Unit Kerja Pusat dan perwakilan Balai Besar/Balai POM yang terkait. Hasil pembahasan diarahkan dengan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (Simplification-S), penghilangan proses yang tidak perlu (Elimination-E), pembuatan proses yang sama sekali baru (Reengineering-R), dan pengautomatisasian (Automation-A) yang akan disosialisasikan pada 14 April 2022.

b. Pelaksanaan Lelang Penyedia QMS BPOM

Persiapan pengadaan surveilan ISO 9001:2015 BPOM tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. April 2023 disesuaikan jumlah unit organisasi dan proses audit yang akan diterapkan. Persiapan pengadaan surveilan tersebut meliputi pembahasan proses audit, metode pengadaan dan pembuatan dokumen pengadaan. Pembahasan terkait pengadaan bersama dengan Tim Inspektorat, Tim UKPBJ, Pejabat Pembuat Komitmen, dan BSN sebagai narasumber dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 Maret 2023. Dokumen pengadaan yang dihasilkan akan disampaikan pada tim UKPBJ BPOM melalui surat PPK. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai bahan seleksi pengadaan jasa konsultansi surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM yang diumumkan melalui lpse.pom.go.id pada bulan Mei 2023.

BAB X

Kerjasama Internasional

1. Badan POM Perkuat Kerja Sama Peningkatan Kapasitas ke Australia

Kunjungan kerja ke Australia dilakukan dalam rangka partisipasi pada Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP) Regulatory Practice Workshop di Canberra. Workshop diselenggarakan oleh Therapeutics Goods Administration (TGA) selaku otoritas regulator obat Australia, dan diikuti oleh otoritas regulator obat negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Pada pembukaan workshop, Badan POM berbagi pengalaman terkait penanganan kasus cemaran etilen dan dietilen glikol (EG/DEG) pada sirup obat untuk anak di Indonesia. Sharing informasi ini diharapkan dapat mencegah hal serupa terjadi di negara lain di masa mendatang.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Badan POM untuk melakukan pertemuan bilateral dengan TGA guna membahas keberlanjutan kerja sama antara Badan POM dengan TGA di bawah kerangka RSP. Pertemuan juga membahas rencana kerja sama ke depan, antara lain area prioritas untuk peningkatan kapasitas Badan POM yang memerlukan dukungan TGA, serta harapan agar kolaborasi ke depan juga dapat mencakup complementary medicines, untuk meningkatkan daya saing obat tradisional Indonesia di pasar global.

Di Canberra, Badan POM juga melakukan pertemuan dengan tim Australia Awards yang berada di bawah Australian Department of Foreign Affairs and Trade, untuk berdiskusi mengenai dukungan beasiswa program short course dan pendidikan lanjutan (Master dan Doktoral) dalam rangka peningkatan kompetensi bagi pegawai Badan POM. Pada kesempatan ini, pihak Australia Awards menyampaikan beberapa mekanisme beasiswa yang dapat dimanfaatkan Badan POM, antara lain fellowship program, short course, dan Split-Site Masters Program.

Selanjutnya, di Sydney Badan POM melakukan pertemuan dengan Centre for Continuing Education (CCE), the University of Sydney, untuk menjajaki penyelenggaraan tailor-made training untuk peningkatan kapasitas Badan POM di bidang perencanaan dan penganggaran. Pihak CCE menyampaikan opsi-opsi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan Badan POM untuk selanjutnya dapat ditetapkan prioritas pelatihan dengan opsi pelaksanaan secara luring maupun daring.

Sebagai tindak lanjut beberapa pertemuan tersebut, Badan POM akan melakukan pembahasan lanjutan dengan TGA terkait mekanisme perpanjangan kerja sama, serta akan melanjutkan pembahasan peningkatan kapasitas pada masing-masing area prioritas yang telah disampaikan kepada TGA. Badan POM juga akan menindaklanjuti pertemuan dengan tim Australia Awards dengan menjajaki usulan program fellowship, short course, dan/atau Split-Site Masters Program. Dengan Centre for Continuing Education, the University of Sydney, Badan POM akan berkomunikasi lebih lanjut untuk menyusun prioritas pelatihan dan menjajaki pengaturan pelaksanaan pelatihan.

BADAN POM
BerAKHLAK
ASEAN INDONESIA 2023
PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN BADAN POM
SENIN, 03 JULI 2023

BAB XI

Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan I ini telah dilaksanakan 3 kegiatan terkait pengelolaan kinerja yaitu sosialisasi penilaian kinerja menggunakan aplikasi SIMAKIN dan pendampingan penyusunan perencanaan kinerjan pada bulan Januari, serta sosialisasi Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai berdasarkan SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 pada bulan Februari.

Badan POM juga terus berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Badan POM, dan penerimaan 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari ikatan dinas Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang akan menjabat sebagai Auditor Terampil dan Penata Laksana Barang Terampil.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Integrated Development and Training Information System (IDEAS) merupakan platform pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur online shopping training atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelanjaran secara online kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi online yang dapat diikuti oleh pegawai Badan POM dengan narasumber yang berasal dari internal Badan POM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat online di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan https://siasn.pom.go.id.

Badan POM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk sharing data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Pada triwulan I 2023, sebanyak 263 data/informasi/pengetahuan telah publish dan dikelola dalam aplikasi SIMPHONI.

BAB XII

Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I 2023

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.215.929.014.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp359.781.543.514,- (16,24%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp150.527.140.800,- ,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp 176.618.447.336,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp 32.635.955.378,-.

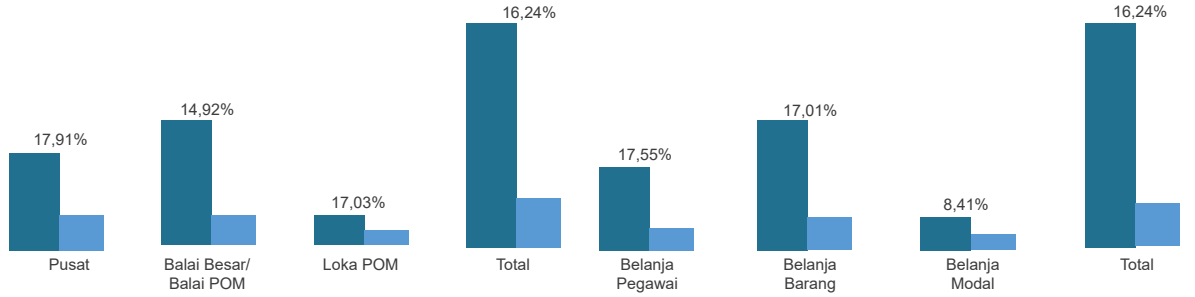

Gambar 27. Realisasi Anggaran s.d Triwulan I 2023

UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
Pusat	840.544.376.000	150.527.140.800	17,91%
Balai Besar/ Balai POM	1.183.731.905.000	176.618.447.336	14,92%
Laka POM	191.652.733.000	32.635.955.378	17,03%
Total	2.215.929.014.000	359.781.543.514	16,24%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
PAGU	730.117.421.000	1.240.454.563.000	245.357.030.000	2.215.929.014.000
REALISASI	128.102.244.315	211.046.917.668	20.632.381.531	359.781.543.514
%	17,55%	17,01%	8,41%	16,24%

BAB XIII

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2023. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifkasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.

Lampiran I

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	Indeks Pengawasan Obat	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	93,30	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93,50	%	94,64	101,22%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84,20	%	89,33	106,09%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89,50	%	91,24	101,94%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	79	%	89,13	112,82%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	87,19	96,88%
		Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90,35	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	%	87,58	94,17%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	70	%	55,64	79,49%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94	%	82,63	87,90%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	65	%	65,05	100,08%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	68	%	74,54	109,62%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.1	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	Indeks pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,39	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan Kosmetik yang baik	79	%	22,36	28,30%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95	Nilai	93,01	97,91%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	2.700	Sekolah	Progres 20,73%	
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	874	Desa	Progres 22,33%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	350	Pasar	Progres 25,79%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	21,65	21,65%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	21,42	21,42%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	77	%	20,27	26,32%
		Indeks RB UPT	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	83	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Nilai kinerja anggaran UPT	94,50	Nilai	62,16	65,78%
1.2	**Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88	%	20	22,73%
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	85	%	Triwulan II	Triwulan II
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	90	%	89,77	99,74%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	94	%	100	106,38%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	91	Nilai	75	82,42%
1.3	**Intelijen Obat dan Makanan**	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	83	%	50	60,24%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	83	%	51,35	61,87%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	83	%	100	120,48%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai pedoman	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81,80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	91	%	75	82,42%
1.4	**Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**	Persentase sarana produksi obat tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	86	%	95,16	110,65%
		Persentase iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	77	%	78,57	102,04%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan oleh UPT	86	%	97,26	113,09%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	83	%	88,25	106,33%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	%	79,35	101,73%
		Persentase laporan keamanan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	95	%	100	105,26%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	63	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	86,85	95,44%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	75	75,76%
1.5	**Pengawasan Produksi Pangan Olahan**	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	76	%	60,10	79,08%
		Persentase peningkatan industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	16	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	65	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	%	94,29	102,49%
		Persentase koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	85	%	20	23,53%
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengawasan produksi yang diberikan	87	%	87	100,00%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	254	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana produksi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	100	109,89%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4,40	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2.50	Indeks	2	80,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	%	75	81,52%
1.6	**Pengawasan Kosmetik**	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79,08	89,86%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79,37	90,19%
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	86	%	97,26	113,09%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88	%	95,39	108,40%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84	%	87,07	103,65%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	%	90,84	99,82%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93	%	86,58	93,10%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2,50	Indeks	1,75	70,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	%	75	75,00%
1.7	**Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan publik distribusi obat	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	87	%	88	101,15%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	87	%	100	114,94%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	81	%	79,41	98,04%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	94	%	97,45	103,67%
1.6	**Pengawasan Kosmetik**	Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,40	Indeks	Triwulan III	Triwulan III
		Persentase *stakeholder* yang mendapat *regulatory assistance* di bidang distribusi dan pelayanan obat	80	%	27,71	34,64%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	82	Indeks	49,29	60,11%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,50	Indeks	2,75	110,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	100	113,64%
1.6	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	91,03	119,78%
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18.100	Dokumen	5.593	30,90%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	94,44	%	94,32	99,87%
		Persentase laporan farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	74,21	106,01%
1.7	**Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**	Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang ditindaklanjuti	87	%	30,55	35,11%
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.400	Label dan Iklan	14.504	24,01%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	3	Indeks	2,75	110,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		obat, narkotika, psikotropika dan prekursor Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98	%	100	102,04%
1.9	**Pengawasan Peredaran Pangan Olahan**	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	71	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	850	sarana	990	116,47%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86	indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan *post market* sesuai standar	254	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	95	%	90,03	94,77%
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	84	%	90,23	107,42%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,61	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	63.322	Permohonan	15.592	24,62%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun \
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	94	%	75	79,79%
1.10	**Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor**	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	65	%	100	153,85%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk *highrisk* lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	91	%	20,69	22,74%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	11,1	11,10%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	78	%	44,44	56,97%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	89	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat *highrisk* lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78	%	44,44	56,97%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	80	%	60,42	75,53%
		Indeks pelayanan publik di lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,40	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	75	%	42,68	56,91%
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	88,40	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang optimal	2,50	Indeks	1,75	70,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	95	%	75	78,95%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	59,01	64,85%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	93,48	98,40%
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,55	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	Indeks	50,75	55,77%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	95	%	92,36	97,22%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,70	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,50	Indeks	1,75	70,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99	%	75	75,76%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89,50	%	38,15	42,63%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi obat	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	77	%	36,34	47,19%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	79	%	76,24	96,51%
		Persentasepengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Obat	4,40	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		PersentasesaranaUK/LabBEyangdiinspeksidanmemenuhiCUKB	87	%	60	68,97%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	0	0,00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90,10	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	89,30	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,50	Indeks	0,75	30,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	95	%	100	105,26%
1.13	**Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	94	%	74,08	78,81%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik dan DIP	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	83	%	91,24	109,93%
		Persentase pengaduan terkait registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/ klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	75	%	96,13	128,17%
		Indeks pelayanan publik di registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, dan penilaian uji praklinik/klinik	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83	%	88,25	106,33%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/ klinik dan DIP yang efektif	78	%	88,22	113,10%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	88	%	88,18	100,20%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,70	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2,50	2,25	90,00%	47,19%
1.14	**Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat	97	75	77,32%	96,51%
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	83,70	79,73	Akhir Tahun	100,00%
		Persentase standar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	93	30	32,26%	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang efektif kepada *stakeholder*	92,50	75	81,08%	68,97%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,50	100	104,71%	0,00%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88,80	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88,50	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,75	3	109,09%	30,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	95	95,00%	105,26%
1.15	**Standardisasi Pangan Olahan**	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	77,50	Akhir Tahun	Akhir Tahun	78,81%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai *timeline* tahapan penyusunan	94	26,06	27,72%	109,93%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada *stakeholder* yang efektif	90	90,89	100,99%	128,17%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	92	55	59,78%	Akhir Tahun
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89%	106,33%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,40	Akhir Tahun	Akhir Tahun	113,10%
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,40	Akhir Tahun	Akhir Tahun	100,20%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,50	2	80,00%	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.16	**Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif**	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat	86,10	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada *stakeholders* yang efektif	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	90	%	28,43	31,59%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	89,30	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	100	100,00%
1.17	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan**	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	72	%	Triwulan II	Triwulan II
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	34	%	20	58,82%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	300	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95,50	%	Triwulan III	Triwulan III
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan	227	UMK	31	13,66%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	446	Pemda	Triwulan III	Triwulan III
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	740	Kader/fasilitator	Triwulan II	Triwulan II
		Tingkat efektivitas KIE makanan	95,12	%	Triwulan II	Triwulan II
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	87	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,50	Indeks	2,75	110,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	%	85,23	92,64%
1.18	**Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan**	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	86	%	82,95	96,45%
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	30	%	22,19	73,97%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	92	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	91,20	%	83,87	91,96%
		Persentase baku pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	90,63	%	82,31	90,82%
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	15,79	15,79%
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106,38%
		Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	86	%	71,43	83,06%
		Indeks RB PPPOMN	87,60	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	80,20	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase status akreditasi	86	nilai	71	82,56%
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,50	Indeks	3,00	120,00%
		Nilai kinerja anggaran PPPOMN	95,30	nilai	69,66	73,10%
1.19	**Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan**	Persentase keberhasilan penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	70	%	18,25	26,07%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	86	%	2,7	3,14%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	85	%	Triwulan II	Triwulan II
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	52	%	Triwulan II	Triwulan II
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	65	%	66,67	102,57%
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70	%	13,21	18,87%
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	66,30	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	91	%	75	82,42%
1.20	**Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan**	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	%	69,77	72,68%
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,70	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,60	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,90	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,50	Indeks	2,75	110,00%
		Nilai kinerja anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,50	nilai	69,77	75,43%
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100,00%
		Indeks kepuasan internal terhadap layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	84	Nilai	86,56	103,05%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.21	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM obat tradisional dan kosmetik dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	84	%	25	29,76%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	%	6,80	7,91%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	84	%	25	29,76%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM obat tradisional dan kosmetik	84	%	66,67	79,37%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM obat tradisional dan kosmetik yang sesuai standar	96	%	10,97	11,43%
		Tingkat efektivitas KIE obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	96,08	%	97,38	101,35%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	294	komunitas	20	6,80%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	2,20	Indeks	2	90,91%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99	%	22,67	22,90%
1.22	**Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber**	Persentase rekomendasi analisis siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	81,34	95,69%
		Persentase hasil patroli siber yang ditindaklanjuti	80	%	70,55	88,19%
		Persentase profil pelanggaran/kejahatan siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	86,5	101,76%
		Persentase hasil analisis digital forensik yang dimanfaatkan	90	%	87,43	97,14%
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78,40	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang optimal	2,50	Indeks	2	80,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	75	83,33%
2	**Program Dukungan Manajemen**	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	34,40	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	74,22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai kinerja anggaran BPOM	94,50	Nilai	66,20	70,05%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	88	%	20,55	23,35%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99,01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak-lanjuti BPOM	94,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	**Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM**	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSST)	2	Negara	Triwulan III	Triwulan III
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	84	%	60,56	72,10%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,50	Indeks	2,75	110,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	84	93,33%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,85	%	97,7	97,85%
		Persentase peran Badan POM dalam forum bilateral, regional dan multilateral	88	%	21,05	23,92%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79	%	48,48	61,37%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95,50	%	100	104,71%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	%	20,04	22,77%
		Indeks kepuasan media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,87	Indeks	3,88	100,26%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,74	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74,22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96	Nilai	24,70	25,73%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,57	Nilai	75,31	78,80%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	25	25,00%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,84	Indeks	3,69	96,09%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	81,39	%	40,94	50,30%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	17,47	17,47%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Sekretariat Utama yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	14,58	14,58%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2,50	Indeks	2,75	110,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	90	90,00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan	4,63	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	7,43	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	5,71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,80	Indeks	3,82	100,53%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	37,24	37,24%
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,60	%	98,14	98,53%
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96,26	%	98,14	101,95%
		Indeks pelayanan publik	4,60	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,50	Indeks	2,75	110,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,70	%	95,7	100,00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	6,04	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks sistem merit	0,94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro SDM	3,47	Indeks	Triwulan II	Triwulan II
		Persentase ASN BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai pedoman pola karir	77	Indeks	Triwulan II	Triwulan II
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal Baik	93	%	99,81	107,32%
		Indeks kesejahteraan pegawai	3,07	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik	74	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	82,50	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	84,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro SDM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro SDM	100,00	%	75	75,00%
2.5	**Pengembangan SDM Aparatur Badan POM**	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	%	80,10	98,89%
		Jumlah SDM pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar	851	SDM	165	19,39%
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4,71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	62	%	15,20	24,52%
		Persentase kerja sama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti.	94	Kerja Sama	47,06	50,06%
		Nilai penyelenggaraan pengembangan kompetensi	4,47	Nilai	4,48	100,22%
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	55	%	54,73	99,51%
		Nilai kepuasaan layanan PFM	4,10	Nilai	4,42	107,80%
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan	89	Nilai	20	22,47%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks reformasi birokrasi PPSDM POM	87	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN PPSDM POM	85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2,50	Indeks	3,00	120,00%
		Nilai kinerja anggaran PPSDM POM	94,50	Nilai	68,76	72,76%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM	94	%	75	79,79%
2.6	**Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan**	Indeks SPBE BPOM	3,30	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan layanan TIK	3,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu	96	%	96,83	100,86%
		Persentase pemenuhan *bussines continuity management*	39	%	39	100,00%
		Indeks CSIRT *(Computer Security Indeks Respon Time)*	4	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemanfaatan layanan perpustakaan	90	%	33,35	37,06%
		Jumlah data berbagi pakai	25	%	24	96,00%
		Persentase data dan informasi yang mutakhir	100	%	24	24,00%
		Persentase sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *real time*	85	Nilai	79,65	93,71%
		Persentase pemenuhan infrastuktur TIK sesuai dengan *roadmap* TIK	100	%	16,67	16,67%
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,20	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,90	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3	100,00%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastuktur, data dan keamanan	75	%	56,49	75,32%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94,80	Nilai	51,87	54,72%
2.7	**Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I**	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat I	99,01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak-lanjuti BPOM	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85,90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspek-torat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	95	%	90,04	94,78%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklan-juti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	0	0,00%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	72,22	76,83%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev rencana aksi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	87,20	Indeks	71,64	82,16%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pngelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	91	Indeks	75	82,42%
		Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.7	**Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II**	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	99,01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	85,90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	87,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	100	%	100	100,00%
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	95	%	97,82	102,97%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	94	%	98	104,26%
		Persentase permintaan layanan konsultansi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	86,10	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,25	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	2,50	Indeks	2,5	100,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	91	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.7	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	92	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2,95	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	74	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Umum	3,78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Obat dan Makanan sesuai perencanaan	100	Persen	23,08	23,08%
		Persentase unit kerja yang mampu mengelola arsip dengan baik sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	89	Persen	75	84,27%
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	85	Persen	92	108,24%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh satker	87	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	88	Persen	90,25	102,56%
		Indeks RB Biro Umum	84,20	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2,50	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Umum	91	%	75	82,42

Lampiran II

A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1.	**Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan**	**364.734.836.000**	**69.988.498.872**	**19,19%**
1.1	Biro Kerjasama	15.698.337.000	4.256.496.742	**27,11%**
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	20.997.974.000	5.603.165.157	**26,68%**
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	13.608.599.000	2.887.640.077	**21,22%**
1.4	Biro Umum	123.266.485.000	22.561.154.753	**18,30%**
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	191.163.441.000	34.680.042.143	**18,14%**
2.	**Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**	**57.949.442.000**	**13.591.908.346**	**23,45%**
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	9.762.277.000	2.611.704.226	**26,75%**
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	13.084.827.000	2.833.761.452	**21,66%**
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	12.464.912.000	3.295.149.022	**26,44%**
2.4	Dit. Registrasi Obat	12.501.315.000	3.211.349.006	**25,69%**
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	10.136.111.000	1.639.944.640	**16,18%**
3.	**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**	**54.877.335.000**	**11.144.840.398**	**20,31%**
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	12.417.422.000	2.290.317.280	**18,44%**
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	10.540.301.000	1.269.959.781	**12,05%**

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	11.904.081.000	3.030.169.279	**25,45%**
3.4	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.215.901.000	1.652.285.027	**22,90%**
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.799.630.000	2.902.109.031	**22,67%**
4	**Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**	**66.611.701.000**	**10.605.757.348**	**15,92%**
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.924.637.000	3.007.474.937	**16,78%**
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.373.577.000	2.430.777.206	**16,91%**
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	9.611.993.000	1.866.926.918	**19,42%**
4.4	Dit. Standrdisasi Pangan Olahan	9.123.257.000	1.256.500.440	**13,77%**
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15.578.237.000	2.044.077.847	**13,12%**
5	**Deputi Bidang Penindakan**	**55.537.240.000**	**10.943.269.446**	**19,70%**
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	11.672.409.000	2.434.943.814	**20,86%**
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	7.945.762.000	1.909.722.931	**24,03%**
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	8.089.254.000	2.606.677.265	**32,22%**
5.4	Dit. Cegah Tangkal	27.829.815.000	3.991.925.436	**14,34%**
6	**Inspektorat Utama**	**29.615.574.000**	**4.427.723.821**	**14,95%**

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
6.1	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	22.966.753.000	3.765.345.453	**16,39%**
6.2	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6.648.821.000	662.378.368	**9,96%**
7.	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	**77.515.080.000**	**11.241.017.306**	**14,50%**
8.	**Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**	**23.934.915.000**	**2.651.934.246**	**11,08%**
9.	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	**60.676.165.000**	**8.061.936.768**	**13,29%**
10.	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	**49.092.088.000**	**7.870.254.249**	**16,03%**
	TOTAL SATKER PUSAT	**840.544.376.000**	**150.527.140.800**	**17,91%**

B. BALAI BESAR/BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1.	BANDA ACEH	27.258.618.000	**6.155.058.194**	22,58%
2.	SERANG	29.039.947.000	**5.965.120.629**	20,54%
3.	PEKAN BARU	35.439.413.000	**6.930.224.410**	19,56%
4.	JAMBI	34.242.011.000	**6.609.602.075**	19,30%
5.	BENGKULU	28.585.736.000	**5.424.077.995**	18,97%
6.	KENDARI	29.399.482.000	**5.576.133.271**	18,97%
7.	PANGKAL PINANG	16.470.120.000	**3.075.955.687**	18,68%
8.	PALEMBANG	30.797.586.000	**5.692.129.689**	18,48%
9.	PALANGKARAYA	21.461.208.000	**3.699.595.641**	17,24%
10.	BATAM	22.295.115.000	**3.820.374.784**	17,14%
11.	MAMUJU	20.784.898.000	**3.436.251.825**	16,53%
12.	PONTIANAK	7.729.090.000	**4.505.026.112**	16,25%
13.	MANOKWARI	20.871.326.000	**3.301.317.494**	15,82%
14.	MEDAN	46.622.399.000	**7.327.752.134**	15,72%
15.	AMBON	35.951.230.000	**5.603.070.640**	15,59%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
16.	BANDUNG	75.260.350.000	**11.714.438.459**	15,57%
17.	MATARAM	23.995.139.000	**3.705.399.346**	15,44%
18.	DENPASAR	43.730.018.000	**6.727.773.083**	15,38%
19.	YOGYAKARTA	40.653.204.000	**6.218.986.298**	15,30%
20.	TARAKAN	15.155.947.000	**2.271.893.490**	14,99%
21.	SAMARINDA	28.816.721.000	**4.294.962.418**	14,90%
22.	SEMARANG	61.686.206.000	**8.940.590.096**	14,49%
23.	JAKARTA	48.085.117.000	**6.899.774.388**	14,35%
24.	BANDAR LAMPUNG	34.787.743.000	**4.754.255.860**	13,67%
25.	SURABAYA	61.048.715.000	**8.243.135.482**	13,50%
26.	JAYAPURA	28.568.667.000	**3.793.238.314**	13,28%
27.	KUPANG	30.215.555.000	**3.951.941.863**	13,08%
28.	MANADO	47.280.940.000	**5.754.840.484**	12,17%
29.	GORONTALO	18.539.331.000	**2.247.151.414**	12,12%
30.	PALU	24.385.351.000	**2.799.619.171**	11,48%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
31.	BANJARMASIN	32.194.714.000	**3.289.034.318**	10,22%
32.	MAKASSAR	61.103.863.000	**6.187.492.849**	10,13%
33.	SOFIFI	22.467.454.000	**2.259.228.876**	10,06%
34.	PADANG	58.808.691.000	**5.443.000.547**	9,26%
	TOTAL SATKER BALAI	**1.183.731.905.000**	**176.618.447.336**	**14,92%**

C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1.	KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.174.761.000	**913.954.766**	28,79%
2.	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.040.645.000	**1.155.597.606**	28,60%
3.	KABUPATEN BOGOR	5.534.537.000	**1.279.197.985**	23,11%
4.	KOTA BAUBAU	4.722.176.000	**1.076.905.379**	22,81%
5.	KOTA DUMAI	4.466.250.000	**990.686.177**	22,18%
6.	KABUPATEN TANGERANG	4.799.558.000	**1.053.516.125**	21,95%
7.	KOTA SUNGAI PENUH	3.527.728.000	**765.884.737**	21,71%
8.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	3.566.122.000	**771.135.875**	21,62%
9.	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	3.855.436.000	**831.814.079**	21,58%
10.	KABUPATEN SORONG	5.030.624.000	**1.081.515.334**	21,50%
11.	KABUPATEN MIMIKA	4.324.300.000	**918.939.832**	21,25%
12.	KABUPATEN BELITUNG	3.403.197.000	**718.885.811**	21,12%
13.	KABUPATEN TANAH BUMBU	4.334.904.000	**910.117.315**	21,00%
14.	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.350.922.000	**672.427.698**	20,07%
15.	KABUPATEN KEDIRI	4.620.732.000	**919.897.657**	19,91%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
16.	KOTA LUBUKLINGGAU	3.847.267.000	**763.520.764**	19,85%
17.	KOTA TASIKMALAYA	5.286.170.000	**1.044.688.629**	19,76%
18.	KOTA PALOPO	4.847.354.000	**957.740.985**	19,76%
19.	KABUPATEN BANYUMAS	5.673.356.000	**1.106.787.247**	19,51%
20.	KABUPATEN TULANGBAWANG	3.639.212.000	**702.348.024**	19,30%
21.	KABUPATEN JEMBER	3.994.521.000	**767.940.642**	19,22%
22.	KABUPATEN ENDE	5.004.806.000	**932.682.815**	18,64%
23.	KABUPATEN BIMA	3.989.449.000	**740.895.326**	18,57%
24.	KABUPATEN SANGGAU	3.550.129.000	**658.173.564**	18,54%
25.	KABUPATEN BANGGAI	3.465.788.000	**627.472.262**	18,10%
26.	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	4.313.075.000	**779.793.615**	18,08%
27.	KOTA BALIKPAPAN	3.827.525.000	**690.199.103**	18,03%
28.	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	3.113.030.000	**559.156.333**	17,96%
29.	KABUPATEN BULELENG	4.705.613.000	**829.356.830**	17,62%
30.	KOTA PAYAKUMBUH	5.631.453.000	**987.897.498**	17,54%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
31.	KOTA SURAKARTA	5.296.507.000	**927.403.975**	17,51%
32.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.183.140.000	**708.664.815**	16,94%
33.	KOTA TANJUNGPINANG	3.748.397.000	**604.457.624**	16,13%
34.	KABUPATEN MERAUKE	3.532.679.000	**535.015.744**	15,14%
35.	KOTA TANJUNGBALAI	3.051.291.000	**451.508.087**	14,80%
36.	KABUPATEN ACEH SELATAN	6.152.133.000	**771.782.597**	12,54%
37.	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	11.763.078.000	**800.885.065**	6,81%
38.	KABUPATEN REJANG LEBONG	13.293.827.000	**855.681.580**	6,44%
39.	KABUPATEN ACEH TENGAH	12.991.041.000	**771.425.878**	5,94%
	TOTAL SATKER LOKA	**191.652.733.000**	**32.635.955.378**	**17,03%**
	TOTAL SELURUH SATKER	**2.215.929.014.000**	**359.781.543.514**	**16,24%**

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2023

Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat 10560

www.pom.go.id

@bpom_ri

021 4244691

halobpom@pom.go.id

Bpom RI